



BADAN

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN KUTAI TIMUR

RENCANA KERJA TAHUN 2024

MERAJUT BHINNEKA TUNGGAL IKA



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat-NYA sehingga Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 dapat kami rampungkan.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan RENJA agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Semoga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini bermanfaat bagi pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur.

Sangatta, 2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kepala Badan,



Muhammad Basuni, S.Sos.M.Si

Pembina Utama Muda / IVc

NIP.19660715 198803 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	30
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	33
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	46
4.1 Rumusan Perencanaan Pendanaan	46
4.2 Rencana Kerja Perangkat Daerah	46
BAB V PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 Kabupaten Kutai Timur.....	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur	15
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	22
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	41
Tabel 4.1	Rumusan Perencanaan Pendanaan	46
Tabel 4.2	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025	47

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur merupakan penyelenggara urusan pemerintahan umum dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memerlukan perencanaan yang strategis, perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Visi kepala daerah yang terpilih adalah: *Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua*". Untuk mendukung visi dan misi tersebut, telah disusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 yang kemudian akan di jabarkan melalui rencana kerja pada tiap tahunnya. Tahun 2024 diperlukan perencanaan rencana kerja untuk satu tahun kedepan yang biasa disebut Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD). Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan

operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

- Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
- Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Terselenggaranya kegiatan perlu ada sinergi antara semua *stakeholder* dalam penyusunan Rencana Kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan akan berjalan secara efektif dan efisien.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur didasari oleh:

- a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Pemerintahan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679):

- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5430);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- g) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan kerukunan umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pembangunan rumah Ibadat;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik;
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di daerah;

- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai pancasila;
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 61 Tahun 2011 Tentang pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
- o) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- p) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Konflik Sosial;
- q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
- s) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan

Pemerintahan Umum;

- t) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- u) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini daerah;
- v) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- w) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- x) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- y) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No.10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- z) Peraturan Bupati Kutai Timur No.29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana kerja ini di susun dengan maksud untuk di jadikan suatu dokumen perencanaan tahunan untuk Tahun 2023, dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Menjadi dasar penyusunan anggaran belanja melalui

APBD Kabupaten.

- b) Menjadi pedoman dan dasar bagi aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugas.
- c) Sebagai wacana dalam menunjang program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tepat guna.
- d) Memperkuat koordinasi dan menjamin terciptanya suatu kinerja yang mantap berdaya guna dan berhasil guna sesuai maksud dan tujuan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

BAB III TUJUAN , SASARAN ,PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Untuk itu dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah tidak berdiri sendiri melainkan perlu dilakukan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya dan review capaian Rencana Strategi (Rensta) Perangkat Daerah yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan organisasi perangkat daerah baik dalam melaksanakan program dan kegiatannya maupun dalam pencapaian target kinerja yang bersifat outcome dan output. Untuk lebih lengkap rincian hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur sampai dengan Tahun 2023 dapat di lihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2023 (TAHUN ANGGARAN BERJALAN)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUTAI TIMUR

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra, PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Tahun 2023	
Urusan	Bidang	Urusan	Program					Target Renja PD Tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1			2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12
8				Urusan Pemerintahan Umum									
8	01			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	85%	100%	100%	100	100%	N	N
8	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	5 Dokumen	100
8	01	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	2 Dokumen	3 Dokumen	100
8	01	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8	01	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8	01	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3	01	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3	01	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja PD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Laporan	2 Dokumen	100
3	01	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra_PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Tahun 2023	
Urusan	Bidang	Urusan Program	Kegiatan						Sub Kegiatan	Target Renja PD Tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian
1				2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bidang yang dilayani	4 Bidang	4 Bidang	4 Bidang	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
8	01	01	2.02	01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang di berikan Gaji dan Tunjangan	35 Orang	35 Orang	460 Orang	100	504 Orang	504 Orang	100	
8	01	01	2.02	02	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah TK2D yang di berikan Gaji	42 Orang	42 Orang	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100	
8	01	01	2.02	03	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tenaga Pelaksana yang di bayarkan	11 Orang	11 Orang	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100	
8	01	01	2.02	05	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang di susun	2 Laporan	2 Laporan	2 Dokumen	100	2 Laporan	2 Laporan	100	
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang terdeta	0	0	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
8	01	01	2.03	06	- Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Aset Daerah yang dikelola Perangkat Daerah	0	0	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100	
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang ada di lingkungan Kesbangpol	0	0	77 Orang	100	0	0	0	
8	01	01	2.05	02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan	0	0	1 Paket	100	0	0	0	
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bidang yang dilayani	4 Bidang	4 Bidang	4 Bidang	100	4 Bidang	4 Bidang	100	
8	01	01	2.06	02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100	
8	01	01	2.06	04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	2 Jenis	2 Jenis	4 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100	
8	01	01	2.06	09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	32 kali	29 kali	10 Laporan	100	30 Laporan	30 Laporan	100	

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra_PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program / Kegiatan Tahun berjalan (Tahun n-1) Renja SKPD Tahun 2023	Pertknaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Tahun 2023	
Urusan	Bidang	Urusan Program	Kegiatan					Sub Kegiatan	Target Renja PD Tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1				2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12
8	01	01	2.06	10	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	0	0	12 Dokumen	12 Dokumen	100
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa yang di sediakan	5 Jenis Jasa	5 Jenis Jasa	6 Jenis Jasa	6 Jenis Jasa	100	12 Laporan	12 Laporan	100
8	01	01	2.08	02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	3 Rekening	3 Rekening	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
8	01	01	2.08	04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelaksana yang di bayarkan	2 Orang	2 Orang	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang yang di pelihara	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100	2 Jenis	2 Jenis	100
8	01	01	2.09	01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional yang di pelihara	6 Unit	6 Unit	18 Unit	17 Unit	94,44	25 Unit	25 Unit	100
8	01	01	2.09	06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara	1 Gedung	1 Gedung	20 Unit	20 Unit	100	30 Unit	30 Unit	100
8	01	01	2.09	09	- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara						1 Gedung	1 Gedung	100
8	01	02			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Sekolah dan Forum yang mendapatkan pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan	18,75%	18,75%	18,75%	16,00%	85,33	75,50%	75,50%	100
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pematapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terkasukannya perumusan kebijakan dan pematapan pelaksanaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	18,75%	18,75%	18,75%	16,00%	85,33	75,50%	75,50%	100
8	01	02	2.01	03	- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	0	0	0	0	130 Orang	130 Orang	100

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra_PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keeluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Tahun berjalan (Tahun n-1) Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Tahun 2023		
Urusan	Bidang	Urusan Program	Kegiatan					Sub Kegiatan	Target Renja PD Tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1			2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12	
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	0	0	150 Orang	150 Orang	100	19 Orang	19 Orang	100
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Monitoring Pembauran Kebangsaan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama	18 Kecamatan	18 Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100	0	0	0
8	01	03			Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Cakupan Masyarakat yang mendapat pembinaan pendidikan politik di wilayah Kutai Timur	11%	11%	22%	11,11%	50,51	43%		
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Perwakilan Umum Kepala Daerah serta Pemantapan Situasi Politik.	Tercapainya Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Perwakilan Umum Kepala Daerah serta Pemantapan Situasi Politik.	11%	11%	22%	11,11%	50,51	43%		
8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Perwakilan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Perwakilan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	0	0	0	0	0	10 Parpol	10 Parpol	100
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Perwakilan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat	0	0	150 Orang 10 Parpol	150 Orang 10 Parpol	100	50 Orang	50 Orang	100

Kode Rekening													
Urusan Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra_PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n- 2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) Tahun 2023	Pertkiaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Tahun 2023	
								Target Renja PD Tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1			2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12
8	01	04		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah LSM/Organisasi yang Aktif	123 LSM	123 LSM	139 LSM	228 LSM	164	169 LSM	169 LSM	100
8	01	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Jumlah LSM/Organisasi yang terdaftar	123 LSM	123 LSM	139 LSM	228 LSM	164	169 LSM	169 LSM	100
8	01	04	2.01	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas, LSM, OKP dan Paguyuban terdaftar	110 Lsm	110 Lsm	4 Laporan	4 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
8	01	05		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan Forum dan UKM yang mendapat Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	20%	20%	20%	26,32%	132	40%	40%	100
8	01	05	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan Forum dan UKM yang mendapat Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	20%	20%	20%	26,32%	132	40%	40%	100
8	01	05	2.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti seminar	0	0	0	0	0	75 Orang	75 Orang	100
8	01	05	2.01	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Menurunnya Angka penyalahgunaan Narkoba di Kutai Timur Terciptanya kerukunan antar umat beragama..	6 Laporan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
						18 Kecamatan	18 Kecamatan						

Kode Rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra_PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Tahun berjalan (Tahun n-1) Tahun 2023	Portkiran Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Tahun 2023		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan					Sub Kegiatan	Target Renja PD Tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1				2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12
8	01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial	a. Jumlah Konflik SARA b. Cakupan Konflik Sosial di Wilayah Kutai Timur	a. 0 Kasus b. 100%	a. 0 Kasus b. 100%	a. 0 Kasus b. 100%	a. 0 Kasus b. 100%	100	a. 0 Kasus b. 100%	a. 0 Kasus b. 100%	100
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	a. Jumlah Konflik SARA b. Cakupan Konflik Sosial di Wilayah Kutai Timur	a. 0 Kasus b. 100%	a. 0 Kasus b. 100%	a. 0 Kasus b. 100%	a. 0 Kasus b. 100%	100	a. 0 Kasus b. 100%	a. 0 Kasus b. 100%	100
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	0	0	0	0	30 Orang	30 Orang	100
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Monitoring Pemetaan Konflik di Daerah	18 Kecamatan	18 Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100
8	01	06	2.01	05	- Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
8	01	06	2.01	06	- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah intensitas pertemuan dalam penyelesaian permasalahan	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan indikator kinerja kunci dan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan. Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja.

Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil / keluaran dari program / kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / program / kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi perangkat daerah. Hasil analisis pencapaian kinerja perangkat daerah dapat di lihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kutai Timur

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bakesbangpol			85%	100%	100%	100%	85%	100%	100%	100%	
2	Cakupan Sekolah dan Forum yang mendapatkan pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan			18,75%	18,75%	75,50%	75,83%	18,75%	16,00%	75,50%	75,83%	
3	Cakupan Masyarakat yang mendapat pembinaan pendidikan politik di wilayah Kutai Timur			11%	22%	43%	65%	11%	11,11%	43%	65%	
4	Jumlah LSM/Organisasi yang Aktif			123	139	169	199	123	228	169	199	

5	Cakupan Forum dan UKM yang mendapat Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya			20%	20%	40%	60%	20%	26,32%	40%	60%	
6	Jumlah Konflik SARA			0 Kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 Kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	
	Cakupan Konflik Sosial di Wilayah Kutai Timur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai :

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dalam Tabel 2.3 berikut :

TABEL 2.3
ISU STRATEGIS UTAMA RANWAL RKPd PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tema RKPd 2024	No	Isu Strategis Utama	Keterkaitan dengan RPJMD 2021 - 2026				
			Misi 1	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI GUNA MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAERAH"	1	Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024	MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAHLAK MULIA, BERBUDAYA DAN BERSATU	Mewujudkan Kesadaran masyarakat yang berkelanjutan untuk mendukung Pelaksanaan Pemilu tahun 2024	1 Menurunnya Potensi Konflik yang dapat menghambat Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024	1 Meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan terhadap potensi instabilitas keamanan dan kenyamanan Masyarakat	Pengajuan pada pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan Siswa dan Masyarakat
					2 Meningkatkan Pemahaman Politik Masyarakat di Kabupaten Kutai Timur	2 Menyelenggarakan Kegiatan peningkatan Kapasitas kelembagaan Masyarakat Melalui Peran FKUB, FKDM, FPK.	Mem buka Kerjasama antar tokoh agama, tokoh masyarakat dan Pemuda

[illegible]

	2	Penyalahgunaan NAPZA				
	3	Mewujudkan lingkungan masyarakat, pemerintahan, tempat kerja, kampus/sekolah bersih Narkoba.	5	Membangun kemampuan dan ketahanan diri masyarakat dalam menghadapi pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.	Konsolidasi. Seluruh elemen (pemerintah, swasta dan masyarakat) berkontribusi dalam P4GN	Deteksi dini. secara berkala di lingkungan instansi, organisasi, kampus, sekolah dan lingkungan masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur. Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur. Program dan kegiatan Tahun 2024 yang telah diusulkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur merupakan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) oleh karena itu perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD 2024 tersebut. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terhadap Program dan Kegiatan beserta Rencana Kebutuhan Dana yang termuat dalam dokumen Rancangan Awal Renja-PD yang disusun dari tahap Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir dan apabila ada koreksi atau terdapat perbedaan dalam hasil review pada setiap tahap penyusunannya dapat

diperbaiki atau disempurnakan sebelum ditetapkan RKP
Kabupaten Tahun 2024. Secara keseluruhan, hasil telaahan
terhadap Rancangan Awal RKP Kabupaten Kutai Timur Tahun
2024 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.4. berikut.

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUTAI TIMUR

Kode Rekening			Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Output / Outcome	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
8 01	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 01 01				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
8 01 01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol				Rp 9.436.519,251				Rp 10.933.399,360
8 01 01 2.01				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun			Rp 700.000,000	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun			Rp 960.000,000
8 01 01 2.01 01				Penyusunan Dokumen - Perencanaan Perangkat Daerah	Kutai Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja, RKA, DPA, LK, LP dan Laporan Evaluasi	2	Dokumen	Rp 350.000,000	Dokumen Renja, RKA, DPA, LK, LP dan Laporan Evaluasi	2	Dokumen	Rp 450.000,000
9 01 01 2.01 02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kutai Timur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen Renja, RKA, DPA, LK, LP dan Laporan Evaluasi	1	Dokumen	Rp 25.000,000	Dokumen Renja, RKA, DPA, LK, LP dan Laporan Evaluasi	1	Dokumen	Rp 50.000,000
11 01 01 2.01 04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kutai Timur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen Renja, RKA, DPA, LK, LP dan Laporan Evaluasi	1	Dokumen	Rp 25.000,000	Dokumen Renja, RKA, DPA, LK, LP dan Laporan Evaluasi	1	Dokumen	Rp 50.000,000
8 01 01 2.01 06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kutai Timur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Renja, RKA, DPA, LK, LP dan Laporan Evaluasi	1	Dokumen	Rp 150.000,000	Dokumen Renja, RKA, DPA, LK, LP dan Laporan Evaluasi	1	Dokumen	Rp 200.000,000
8 01 01 2.01 07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Renja, RKA, DPA, LK, LP dan Laporan Evaluasi	4	Laporan	Rp 150.000,000	Dokumen Renja, RKA, DPA, LK, LP dan Laporan Evaluasi	4	Laporan	Rp 200.000,000
8 01 01 2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp 6.886.519,251	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp 7.960.399,360
8 01 01 2.02 01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kutai Timur	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen CALK (Cacatan Akhir Laporan Keuangan)	504	Orang	5.713.122,299	Dokumen CALK (Cacatan Akhir Laporan Keuangan)	504	Orang	6.641.608,025
8 01 01 2.02 02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kutai Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen CALK (Cacatan Akhir Laporan Keuangan)	12	Dokumen	936.396,952	Dokumen CALK (Cacatan Akhir Laporan Keuangan)	12	Dokumen	768.388,360
8 01 01 2.02 03				Pelaksanaan Penatausahaan - dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kutai Timur	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen CALK (Cacatan Akhir Laporan Keuangan)	4	Dokumen	Rp 150.000,000	Dokumen CALK (Cacatan Akhir Laporan Keuangan)	4	Dokumen	Rp 300.402,975
8 01 01 2.02 05				Koordinasi dan Penyusunan - Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kutai Timur	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dokumen CALK (Cacatan Akhir Laporan Keuangan)	2	Laporan	Rp 85.000,000	Dokumen CALK (Cacatan Akhir Laporan Keuangan)	2	Laporan	Rp 250.000,000

RENJA KESBANGPOL

Kode Rekening				Rancangan Awal Rencana Kerja				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting				
Urusan	Bidang	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Output / Outcome	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting	
			1			2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	
8	01	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kulai Timur		Tertaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Rp 110.000.000	Tertaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Rp 118.000.000		
8	01	01	2.03	01	-	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Kulai Timur	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Hasil Pencatatan Aset daerah yang dikelola perangkat daerah	1	Dokumen	Rp 10.000.000	Dokumen Hasil Pencatatan Aset daerah yang dikelola perangkat daerah	1	Dokumen	Rp 18.000.000
8	01	01	2.03	06	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kulai Timur	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Dokumen Hasil Pencatatan Aset daerah yang dikelola perangkat daerah	1	Laporan	Rp 100.000.000	Dokumen Hasil Pencatatan Aset daerah yang dikelola perangkat daerah	1	Laporan	Rp 100.000.000
8	01	01	2.06			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Tertaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp 250.000.000	Tertaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp 150.000.000		
8	01	01	2.05	02	-	Pengadaan Pakaien Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kulai Timur	Jumlah Pengadaan Pakaien Dinas ASN	Aparatur Sipil Negara Badan Kesbangpol	1	Paket	Rp 50.000.000	Aparatur Sipil Negara Badan Kesbangpol	1	Paket	Rp 50.000.000
8	01	01	2.05	09	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kulai Timur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Aparatur Sipil Negara Badan Kesbangpol	50	Orang	Rp 200.000.000	Aparatur Sipil Negara Badan Kesbangpol	50	Orang	Rp 100.000.000
8	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			Tertaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 370.000.000	Tertaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 595.000.000		
8	01	01	2.06	02	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kulai Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	ATK Logistik dll	50	Paket	80.000.000	ATK Logistik dll	50	Paket	100.000.000
8	01	01	2.06	04	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kulai Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	ATK Logistik dll	24	Paket	50.000.000	ATK Logistik dll	24	Paket	75.000.000
8	01	01	2.06	09	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kulai Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ATK Logistik dll	12	Laporan	225.000.000	ATK Logistik dll	12	Laporan	350.000.000
9	01	01	2.07	10	-	Penatausahaan Asrip Dinamis pada SKPD	Kulai Timur	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asrip Dinamis pada SKPD	ATK Logistik dll	1	Dokumen	15.000.000	ATK Logistik dll	1	Dokumen	70.000.000
8	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 350.000.000	Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 400.000.000		
8	01	01	2.08	02	-	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kulai Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan Pembayaran Listrik, Air dan Internet	12	Laporan	250.000.000	Laporan Pembayaran Listrik, Air dan Internet	12	Laporan	250.000.000
8	01	01	2.08	04	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kulai Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Pembayaran Listrik, Air dan Internet	12	Laporan	100.000.000	Laporan Pembayaran Listrik, Air dan Internet	12	Laporan	150.000.000

Kode Rekening			Rancangan Awal Rencana Kerja				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting			
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Output / Outcome	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
		1			2	3	4	5	6	7		11	12	13
8 01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 770.000.000	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 770.000.000	
8 01	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kutai Timur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya kendaraan dinas dan peralatan kantor yang siap pakai	25 Unit	Rp 220.000.000	Tersedianya kendaraan dinas dan peralatan kantor yang siap pakai	25 Unit	Rp 220.000.000	
8 01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kutai Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya kendaraan dinas dan peralatan kantor yang siap pakai	20 Unit	Rp 50.000.000	Tersedianya kendaraan dinas dan peralatan kantor yang siap pakai	20 Unit	Rp 50.000.000	
8 01	01	2.09	09		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kutai Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya kendaraan dinas dan peralatan kantor yang siap pakai	1 Gedung	Rp 500.000.000	Tersedianya kendaraan dinas dan peralatan kantor yang siap pakai	1 Gedung	Rp 500.000.000	
8 01	02				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				75,33 %	Rp 790.000.000		75,33 %	Rp 9.290.000.000	
8 01	02	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan penempatan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan penempatan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Rp 790.000.000	Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan penempatan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Rp 9.290.000.000	
8 01	02	2.01	01		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kutai Timur	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen Kebijakan Teknis dan penempatan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen	Rp 30.000.000	Dokumen Kebijakan Teknis dan penempatan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen	Rp 60.000.000	
8 01	02	2.01	02		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kutai Timur	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen Kebijakan Teknis dan penempatan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen	Rp 15.000.000	Dokumen Kebijakan Teknis dan penempatan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen	Rp 1.010.000.000	
8 01	02	2.01	03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kutai Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen Kebijakan Teknis dan penempatan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	40 Orang	Rp 50.000.000	Dokumen Kebijakan Teknis dan penempatan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	40 Orang	Rp 7.500.000.000	
8 01	02	2.01	04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kutai Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen Kebijakan Teknis dan penempatan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1100 Orang	Rp 205.000.000	Dokumen Kebijakan Teknis dan penempatan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1100 Orang	Rp 350.000.000	

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode Rekening			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Output / Outcome	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
Urusan	Bidang Urusan	Program Kegiatan					6	7				
		1	2	3	4	5						
8 01	02 2.01	05 -	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kulai Timur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen Kebijakan Teknis dan pemantauan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2	Laporan Rp 240.000.000	Dokumen Kebijakan Teknis dan pemantauan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2	Laporan Rp 120.000.000	
8 01	02 2.01	06 -	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kulai Timur	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen Kebijakan Teknis dan pemantauan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	180	Keluarga Rp 250.000.000	Dokumen Kebijakan Teknis dan pemantauan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	180	Keluarga Rp 250.000.000	
8 01	03		Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik				65 %	Rp 2.928.072.304		65 %	Rp 51.089.451.954	
8 01	03 2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelayang Penerimaan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantapan Situasi Politik.			Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelayang Penerimaan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantapan Situasi Politik.		Rp 2.928.072.304	Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelayang Penerimaan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantapan Situasi Politik.		Rp 51.089.451.954	
8 01	03 2.01	01 -	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelayang Penerimaan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah	Kulai Timur	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelayang Penerimaan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelayang Penerimaan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantapan Situasi Politik.	1	Dokumen Rp 20.000.000	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelayang Penerimaan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantapan Situasi Politik.	1	Dokumen Rp 20.000.000	

Kode Rekening			Rancangan Awal Rencana Kerja				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
Urusan	Bidang Urusan	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Output / Outcome	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
		1		2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3	4	5 Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	6	7	11	12	13	14
8 01	03	2.01	02	- Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kutai Timur	Jumlah Dokumen Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 Dokumen	Rp 40.000.000	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 Dokumen	Rp 43.965.623.108	
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	10 Orang	Rp 235.000.000	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	10 Orang	Rp 800.000.000	
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2800 Orang	Rp 2.050.000.000	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	## Orang	Rp 1.596.999.996	
8 01	03	2.01	04	- Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kutai Timur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	10 Laporan	Rp 583.072.304	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	10 Laporan	Rp 4.666.828.850	
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	199 LSM	Rp 570.000.000	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	199 LSM	Rp 570.000.000	
8 01	04			Program Pemberdayaan dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan				199 LSM	Rp 570.000.000		199 LSM	Rp 570.000.000	
8 01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan			Tersedia Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan		Rp 570.000.000	Tersedia Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan		Rp 570.000.000	

Kode Rekening			Rancangan Awal Rencana Kerja				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Output / Outcome	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14
8 01	04 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan.	1 Dokumen	Rp 75.000.000	Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan.	1 Dokumen	Rp 75.000.000	
8 01	04 2.01 02	Penyusunan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Dokumen Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan.	1 Dokumen	Rp 95.000.000	Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan.	1 Dokumen	Rp 95.000.000	
8 01	04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan.	200 Orang	Rp 100.000.000	Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan.	200 Orang	Rp 100.000.000	
8 01	04 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan.	200 Orang	Rp 150.000.000	Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan.	200 Orang	Rp 150.000.000	
8 01	04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan.	10 Laporan	Rp 150.000.000	Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan.	10 Laporan	Rp 150.000.000	
8 01	05	Program Pembiayaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				60 %	Rp 1.770.000.000		60 %	Rp 2.770.000.000	
8 01	05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Rp 1.770.000.000	Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Rp 2.770.000.000	
8 01	05 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pengcambahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kutai Timur	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pengcambahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen	Rp 40.000.000	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen	Rp 40.000.000	

Kode Rekening				Rancangan Awal Rencana Kerja				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Output / Outcome	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
		1		2		3	4	5	6	7	11	12	13	14
8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kutai Timur	Jumlah Dokumen Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen	Rp 150.000.000	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen	Rp 1.150.000.000	
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kutai Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	975 Orang	Rp 1.300.000.000	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	975 Orang	Rp 1.300.000.000	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kutai Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	35 Orang	Rp 205.000.000	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	35 Orang	Rp 205.000.000	
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kutai Timur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2 Laporan	Rp 75.000.000	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2 Laporan	Rp 75.000.000	
8	01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial				0 Kasus 100 %	Rp 2.970.000.000		0 Kasus 100 %	Rp 4.670.000.000	
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Rp 2.970.000.000	Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Rp 4.670.000.000	
8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Kutai Timur	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2 Dokumen	Rp 70.000.000	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2 Dokumen	Rp 70.000.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal Rencana Kerja				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
Urusan	Bidang	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Output / Outcome	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatr	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
			1		2		3	4	5	6	7	11	12	13	14
						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Kutai Timur	Jumlah Dokumen Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen	Rp 50.000.000	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen	Rp 1.050.000.000	
8	01	06	2.01	02	-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Kutai Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	200 Orang	Rp 200.000.000	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	200 Orang	Rp 200.000.000	
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Kutai Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	30 Orang	Rp 500.000.000	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	30 Orang	Rp 600.000.000	
8	01	06	2.01	04	-	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Kutai Timur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3 Laporan	Rp 650.000.000	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3 Laporan	Rp 650.000.000	
8	01	06	2.01	06	-	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4 Dokumen	Rp 1.400.000.000	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4 Dokumen	Rp 2.100.000.000	
TOTAL :											Rp 18.464.591.555			Rp 79.322.851.314	

Penetapan program dan kegiatan prioritas tersebut di atas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang mengacu pada Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 144 dan 145, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pembinaan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sebagaimana termuat dalam Lampiran III tentang Matrik Pembangunan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, bahwa pada Matrik Pembangunan Jangka Menengah Kementerian / Lembaga memuat Program Kementerian Dalam Negeri (Halaman 010.A.1) dan yang terkait dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ditetapkan 1 (satu) Program, yaitu : ***“Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum”***. Program tersebut merupakan program teknis dengan tujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pembangunan yang demokratis dan berkedulatan rakyat. Pelaksanaannya didukung melalui 5 (lima) kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam Matrik tersebut (Halaman 010.B.66 dan 010.B.67), yaitu :

1. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (1 indikator);
2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya politik (1 indikator);
3. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (1 indikator);
4. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial (1 indikator);
5. Penguatan Ideologi Pancasila, Karakter Bangsa (1 Indikator).

- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar dan intra suku, umat beragama,
- g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur sebagai lembaga teknis yang bertugas membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam hal merumuskan kebijakan teknis daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan teknis daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Kabupaten Kutai Timur agar dapat berjalan secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional. Ada beberapa faktor kekuatan dan penghambat yang sangat mempengaruhi kinerja dalam mensinergikan kebijakan teknis daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Kabupaten Kutai Timur dengan kebijakan nasional antara lain:

1. Dukungan dan komitmen dari stakeholder pembangunan baik pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan pelajar;
2. Dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah;

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

1. Kurang cepatnya koordinasi dan informasi yang disampaikan;
2. Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 tidak lepas dari pencapaian visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG DAMAI TENTRAM DAN DEMOKRATIS BERWAWASAN KEBANGSAAN”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan dalam 4 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem demokrasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Kutai Timur
2. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang berwawasan Kebangsaan
3. Mewujudkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat dalam rangka menopang stabilitas nasional
4. Mewujudkan kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran peran masyarakat dan Pemerintah dalam pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berwawasan kebangsaan dan berwibawa;
2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan serta persatuan diseluruh lapisan masyarakat;

3. Mengembangkan pendidikan politik yang demokratis melalui kesadaran berpolitik masyarakat, ormas, parpol dan LSM
4. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan suasana lingkungan yang kondusif.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana kerja merupakan penjabaran perencanaan tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan pada setiap akhir tahun anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengimplementasikannya dapat dirumuskan dalam program kerja tahun 2023, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik direncanakan akan melaksanakan 6 (Enam) Program, 12 (Dua belas) Kegiatan dan 49 (Empat Puluh Sembilan) Sub Kegiatan. Sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Adapun uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

❖ Program :Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan :

- Kegiatan : Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :
 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

➤ Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

○ Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

❖ **Program : Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

➤ Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

○ Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tungga Ika dan Sejarah Kebangsaan
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tungga Ika dan Sejarah Kebangsaan
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

❖ **Program : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga**

Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan Etika serta budaya politik.

- Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik.
 - Sub Kegiatan :
 1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. Serta Pemantauan Situasi Politik Daerah.
 2. Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. Serta Pemantauan Situasi Politik Daerah.
 3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik Daerah

4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik Daerah.
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik Daerah.

❖ **Program : Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

- Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
 - Sub Kegiatan :
 1. Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 2. Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 3. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 4. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas

Asing di Daerah.

❖ **Program : Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.**

- Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

○ Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Program Kerja Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah .
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

❖ **Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.**

- Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Sosial.

o Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2. Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
6. Pelaksanaan Forum Koordinasi Kewaspadaan Pimpinan Daerah Kabupaten/kota.

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 secara rinci dapat di lihat **pada Tabel 3.1** berikut:

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUTAI TIMUR

Kode Rekening					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8
8					Urusan Pemerintahan Umum		
8	01				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol	100%
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	5 Dokumen
8	01	01	2.01	01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
8	01	01	2.01	02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
8	01	01	2.01	04	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen
8	01	01	2.01	06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen
8	01	01	2.01	07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen
8	01	01	2.02	01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang / bulan
8	01	01	2.02	02	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
8	01	01	2.02	03	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4 Dokumen
8	01	01	2.02	05	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Laporan
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen
8	01	01	2.03	01	- Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
8	01	01	2.03	06	- Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Laporan
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen
8	01	01	2.05	02	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN	5 Paket
8	01	01	2.05	09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang

Kode Rekening					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Dokumen
8	01	01	2.06	02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
8	01	01	2.06	04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
8	01	01	2.06	09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
8	01	01	2.06	10	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan
8	01	01	2.08	02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
8	01	01	2.08	04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45 Unit
8	01	01	2.09	01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit
8	01	01	2.09	06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit
8	01	01	2.09	09	- pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit Gedung
8	01	02			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Sekolah dan Forum yang mendapatkan pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan	75,83%
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen
8	01	02	2.01	01	- Penyusunan program kerja di bidang Ideologi wawasan kebangsaan bela negra ,karakter bangsa ,pembauran kebangsaan , bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen
8	01	02	2.01	02	- perumusan kebijakan teknis Ideologi wawasan kebangsaan bela negra ,karakter bangsa , pembauran kebangsaan , bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen
8	01	02	2.01	03	- Pelaksanaan kebijakan di bidang idologi wawasan kebangsaan bela negra ,karakter bangsa , pembauran kebangsaan , bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang
8	01	02	2.01	04	- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1000 Orang

Kode Rekening					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	18 Laporan
9	01	02	2.01	06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	180 Keluarga
8	01	03			Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Cakupan Masyarakat yang mendapat pembinaan pendidikan politik di wilayah Kutai Timur	65%
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik.	Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik.	15 Dokumen
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen
8	01	03	2.01	02	Penyusunan bahan perumusan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	13 Dokumen
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5000 Orang
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2800 Orang
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan

Kode Rekening					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
8	01	04			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah LSM/Organisasi yang Aktif	199 LSM
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	1 Dokumen
8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen
8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	200 Dokumen
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	18 Laporan
8	01	05			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan Forum dan UKM yang mendapat Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	60%
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen
8	01	05	2.01	01	penyusunan program kerja ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen
8	01	05	2.01	02	Perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen
8	01	05	2.01	03	pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1000 Orang

Kode Rekening					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
8	01	05	2.01	04	- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang
8	01	05	2.01	05	- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	18 Laporan
8	01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial	a. Jumlah Konflik SARA b. Cakupan Konflik Sosial di Wilayah Kutai Timur	a. 0 Kasus b. 100%
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3 Dokumen
				01	Penyusunan program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen
				02	perumusan kebijakan teknis di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen
				03	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1000 Orang
				04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang
8	01	06	2.01	05	- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan
8	01	06	2.01	06	- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rumusan Perencanaan Pendanaan

Rumusan Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah sebesar Rp.91.922.238.000,- (***Sembilan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah***) sebagaimana diuraikan dalam **Tabel 4.1** di bawah ini:

TABEL 4.1
RENCANA PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KUTAI TIMUR

NO	BIDANG	RENCANA PENDANAAN 2022
1	Sekretariat	Rp 12.285.363.000,-
2	Bidang Wasnas	Rp 6.650.000.000,-
3	Bidang Politik	Rp 59.086.875.000,-
4	Bidang Ideologi & Ekonomi	Rp 13.900.000.000,-
Total		Rp 91.922.238.000,-

4.2 Rencana Kerja Perangkat Daerah

Suatu program dan kegiatan tentunya memerlukan pendanaan yang berkesinambungan dan terukur, agar setiap program dan kegiatan yang di rencanakan sebelumnya dapat berjalan sesuai target yang diharapkan. Namun pendanaan tersebut tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah suatu perangkat daerah.

Untuk lebih jelasnya rumusan pendanaan dalam Renja Tahun 2023 dan pendanaan perkiraan maju Tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel 4.2** berikut:

Kode Rekening				Indikator Kinerja				Rencana Kerja Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
									Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target
8	01			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											
8	01	01		Program Pengujiang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol				100%			Rp 12.286.383.000	APBD	100%	Rp 8.646.877.147
8	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terusun			5 Dokumen	Rp 400.000.000	APBD		5	Dokumen
8	01	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol		Dokumen Renja, RKA, DPA, LK_LJP dan Laporan Evaluasi	Kualai Timur	100%	2 Dokumen	5 Dokumen	Rp 100.000.000	APBD		2 Dokumen
9	01	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol		Dokumen Renja, RKA, DPA, LK_LJP dan Laporan Evaluasi	Kualai Timur	100%	2 Dokumen	5 Dokumen	Rp 50.000.000	APBD		1 Dokumen
11	01	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol		Dokumen Renja, RKA, DPA, LK_LJP dan Laporan Evaluasi	Kualai Timur	100%	2 Dokumen	5 Dokumen	Rp 50.000.000	APBD		1 Dokumen
8	01	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol		Dokumen Renja, RKA, DPA, LK_LJP dan Laporan Evaluasi	Kualai Timur	100%	2 Laporan	5 Dokumen	Rp 100.000.000	APBD		1 Dokumen
8	01	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol		Dokumen Renja, RKA, DPA, LK_LJP dan Laporan Evaluasi	Kualai Timur	100%	1 Laporan	5 Dokumen	Rp 100.000.000	APBD		4 Dokumen
8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2 Dokumen	Rp 8.786.363.000	APBD		100%	Rp 6.656.877.147
8	01	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol		Dokumen CALK (catatan Akhir Laporan Keuangan)	Kualai Timur	100%	39 Orang/bulan	2 Dokumen	6.798.780.000	APBD		504 Orang
8	01	01	2.02	Tugas ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol		Dokumen CALK (catatan Akhir Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN)	Kualai Timur	100%	12 Dokumen	2 Dokumen	1.185.583.000	APBD		12 Dokumen
8	01	01	2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol		Dokumen CALK (catatan Akhir Laporan pengujian/verifikasi keuangan SKPD)	Kualai Timur	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	Rp 500.000.000	APBD		4 Dokumen
8	01	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol		Dokumen CALK (catatan Akhir Laporan dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD)	Kualai Timur	100%	2 Laporan	2 Dokumen	Rp 300.000.000	APBD		4 Laporan
8	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Tertaskannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2 Dokumen	Rp 160.000.000	APBD			Rp 110.000.000
8	01	01	2.03	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol		Dokumen Hasil Pencatatan aset daerah yang dikelola perangkat daerah	Kualai Timur	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	Rp 50.000.000	APBD		Rp 10.000.000
8	01	01	2.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol		Dokumen Hasil Pencatatan aset daerah yang dikelola perangkat daerah	Kualai Timur	100%	4 Laporan	1 Dokumen	Rp 100.000.000	APBD		Rp 100.000.000
8	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Tertaskannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2 Dokumen	Rp 450.000.000	APBD			Rp 220.000.000
8	01	01	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alat Pelengkapannya	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN	Kualai Timur	100%	5 Paket	66 Orang	Rp 150.000.000	APBD		Rp 100.000.000
8	01	01	2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kualai Timur	100%	20 Orang	66 Orang	Rp 300.000.000	APBD		Rp 120.000.000

Kode Renjing	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Keuntungan Dana / Pagu Indikatif
						Progra	Keluaran Sub Kegiatan				Target	Target	
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Teraksennanya Administrasi Umum Perangkat Daerah				4 Dokumen	Rp 850.000.000	APBD			Rp 310.000.000
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	ATK, Logistik dll	Kutai Timur	100%	4 Paket	100%	100.000.000	APBD			Rp 70.000.000
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	ATK, Logistik dll	Kutai Timur	100%	4 Paket	100%	150.000.000	APBD			Rp 20.000.000
8 01 01 2.06 08	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ATK, Logistik dll	Kutai Timur	100%	12 Laporan	100%	500.000.000	APBD			Rp 200.000.000
9 01 01 2.07 10	Penelusuran Asip Dinamis pada SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Penelusuran Asip Dinamis pada SKPD	ATK, Logistik dll	Kutai Timur	100%	1 Dokumen	100%	100.000.000				Rp 20.000.000
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Teraksennanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24 Laporan	Rp 550.000.000	APBD			Rp 350.000.000
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan Pembayaran Listrik, Air dan Internet	Kutai Timur	100%	12 Laporan	100%	300.000.000	APBD			Rp 250.000.000
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Pembayaran Listrik, Air dan Internet	Kutai Timur	100%	12 Laporan	100%	250.000.000	APBD			Rp 100.000.000
8 01 01 2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Teraksennanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				45 Unit	Rp 1.100.000.000	APBD			Rp 300.000.000
8 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan, Pengoran Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibiayakan Pakajnya	Tersedianya kendaraan dinas dan peralatan kantor yang siap pakai	Kutai Timur	100%	25 Unit	100%	Rp 350.000.000	APBD			Rp 250.000.000
8 01 01 2.09 08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya kendaraan dinas dan peralatan kantor yang siap pakai	Kutai Timur	100%	58 Unit	100%	Rp 250.000.000	APBD			Rp 50.000.000
8 01 01 2.09 08	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Tersedianya kendaraan dinas dan peralatan kantor yang siap pakai	Kutai Timur	100%	1 Unit Gedung	100%	Rp 500.000.000	APBD			Rp -
8 01 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Sekolah dan Forum yang mendapatkan pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan (Revolusi Mental, PPK dan PPJK)					75,43 %		Rp 11.450.000.000	APBD			Rp 1.010.000.000
8 01 02 2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantauan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kutai Timur			1 Dokumen	Rp 11.450.000.000	APBD			Rp 1.010.000.000
8 01 02 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bincika Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	Cakupan Sekolah dan Forum yang mendapatkan pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan (Revolusi Mental, PPK dan PPJK)	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bincika Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan yang Disuasun	Dokumen Kebijakan Teknis dan pemantauan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kutai Timur	75.83%	1 Dokumen		Rp 150.000.000	APBD			Rp 40.000.000
8 01 02 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bincika Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	Cakupan Sekolah dan Forum yang mendapatkan pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan (Revolusi Mental, PPK dan PPJK)	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bincika Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan yang Disuasun	Dokumen Kebijakan Teknis dan pemantauan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kutai Timur	75.83%	1 Dokumen		Rp 1.150.000.000	APBD			Rp 30.000.000
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bincika Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	Cakupan Sekolah dan Forum yang mendapatkan pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan (Revolusi Mental, PPK dan PPJK)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bincika Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	Dokumen Kebijakan Teknis dan pemantauan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kutai Timur	75.83%	200 Orang		Rp 8.000.000.000	APBD	Paslabra ka		Rp 100.000.000
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bincika Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	Cakupan Sekolah dan Forum yang mendapatkan pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan (Revolusi Mental, PPK dan PPJK)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bincika Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	Dokumen Kebijakan Teknis dan pemantauan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kutai Timur	75.83%	1000 Orang		Rp 1.500.000.000	APBD			Rp 240.000.000

Kode Rekening	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Kerja Tahun 2024							Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Capaian Program				Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
									Progr m	Keluaran Sub Kegiatan								Hasil Kegiatan
8	01	02	2.01	05	Palaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejahter Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejahter Kebangsaan	Dokumen Kebijakan Teknis dan pematanaan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kulai Timur	75.83%	18 Laporan ✓	Rp 500.000.000	APBD			Rp 300.000.000			
8	01	02	2.01	06	Pembinaan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bermegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembinaan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penguatan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bermegara	Dokumen Kebijakan Teknis dan pematanaan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kulai Timur	75.83%	180 Keluarga ✓	Rp 150.000.000	APBD			Rp 300.000.000			
8	01	03			Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Cakupan Masyarakat yang mendapatkan pembinaan pendidikan politik di wilayah Kulai Timur				65 %	Rp 68.156.875.000	APBD			Rp 1.220.672.304			
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematanaan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pematanaan Situasi Politik.	Tercapainya Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematanaan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pematanaan Situasi Politik.	Tersedanya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematanaan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pematanaan Situasi Politik.			15 Dokumen	Rp 68.156.875.000	APBD			Rp 1.220.672.304			
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pematanaan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pematanaan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematanaan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pematanaan Situasi Politik.	Kulai Timur	65%	1 Dokumen ✓	Rp 150.000.000	APBD			Rp 480.072.304			
8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pematanaan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pematanaan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematanaan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pematanaan Situasi Politik.	Kulai Timur	65%	13 Dokumen	Rp 45.538.875.000	APBD	Hilang KPU, Bawaslu, Paprol & Polres		Rp 80.000.000			
8	01	03	2.01	03	Palaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pematanaan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Palaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pematanaan Situasi Politik di Daerah	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematanaan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pematanaan Situasi Politik.	Kulai Timur	65%	5000 Orang	Rp 2.000.000.000	APBD			Rp 123.500.000			
8	01	03	2.01	04	Palaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pematanaan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pematanaan Situasi Politik di Daerah	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematanaan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pematanaan Situasi Politik.	Kulai Timur	65%	2800 Orang	Rp 1.500.000.000	APBD			Rp 400.000.000			
8	01	03	2.01	05	Palaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pematanaan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pematanaan Situasi Politik di Daerah	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematanaan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pematanaan Situasi Politik.	Kulai Timur	65%	2 Laporan	Rp 8.044.000.000	APBD	Hilang Kodim & Lant		Rp 121.000.000			

Kode Rekening				Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2024										Perkiraan Mgu Rencana Tahun 2025					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Mgu Rencana Tahun 2025				
											Progra m	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Keuntungan Dana / Pagu Indikatif		
8	01	04	04		Program Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi dan Kemasyarakatan	Persentase LSM/Organisasi yang Aktif			Tersediaya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi dan Kemasyarakatan.		200	LSM	Rp	960.000.000	APBD		Rp	720.000.000		
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi dan Kemasyarakatan.								1 Dokumen	Rp	950.000.000	APBD		Rp	720.000.000	
8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengembangan Omas dan Omas Asling di Daerah	Persentase LSM/Organisasi yang Aktif	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengembangan Omas dan Omas Asling di Daerah yang Disusun	Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi dan Kemasyarakatan.	Kualif Timur	199 LSM	1	Dokumen	Rp	100.000.000	APBD			Rp	100.000.000	
8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengembangan Omas dan Omas Asling di Daerah	Persentase LSM/Organisasi yang Aktif	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengembangan Omas dan Omas Asling di Daerah yang Disusun	Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi dan Kemasyarakatan.	Kualif Timur	199 LSM	200	Dokumen	Rp	150.000.000	APBD			Rp	120.000.000	
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengembangan Omas dan Omas Asling di Daerah	Persentase LSM/Organisasi yang Aktif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengembangan Omas dan Omas Asling di Daerah	Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi dan Kemasyarakatan.	Kualif Timur	199 LSM	200	Orang	Rp	300.000.000	APBD			Rp	150.000.000	
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengembangan Omas dan Omas Asling di Daerah	Persentase LSM/Organisasi yang Aktif	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengembangan Omas dan Omas Asling di Daerah	Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi dan Kemasyarakatan.	Kualif Timur	199 LSM	50	Orang	Rp	200.000.000	APBD			Rp	200.000.000	
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengembangan Omas dan Omas Asling di Daerah	Persentase LSM/Organisasi yang Aktif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengembangan Omas dan Omas Asling di Daerah	Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi dan Kemasyarakatan.	Kualif Timur	199 LSM	18	Laporan	Rp	200.000.000	APBD			Rp	150.000.000	
8	01	06	06		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan Forum, UKM dan Sekolah yang mendapat pembinaan ketahanan ekonomi sosial budaya, PAGN & Kerukunan Umat Beragama)					60	%	Rp	2.460.000.000	APBD			Rp	1.520.000.000	
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			Tersediaya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					1 Dokumen	Rp	2.450.000.000	APBD			Rp	1.920.000.000
8	01	05	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencogahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Cakupan Forum, UKM dan Sekolah yang mendapat pembinaan ketahanan ekonomi sosial budaya, PAGN & Kerukunan Umat Beragama)	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencogahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kualif Timur	60%	1	Dokumen	Rp	150.000.000	APBD			Rp	55.000.000	
8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencogahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Cakupan Forum, UKM dan Sekolah yang mendapat pembinaan ketahanan ekonomi sosial budaya, PAGN & Kerukunan Umat Beragama)	Jumlah Dokumen Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencogahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kualif Timur	60%	1	Dokumen	Rp	1.150.000.000	APBD	Hilab FKUB		Rp	75.000.000	
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencogahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Cakupan Forum, UKM dan Sekolah yang mendapat pembinaan ketahanan ekonomi sosial budaya, PAGN & Kerukunan Umat Beragama)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencogahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kualif Timur	60%	1000	Orang	Rp	500.000.000	APBD			Rp	1.500.000.000	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencogahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Cakupan Forum, UKM dan Sekolah yang mendapat pembinaan ketahanan ekonomi sosial budaya, PAGN & Kerukunan Umat Beragama)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencogahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kualif Timur	60%	50	Orang	Rp	500.000.000	APBD			Rp	215.000.000	

Kode Rekening	Bidang Urusan	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana	Tingkat Peningkatan	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
									Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja					
01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kelangkaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Keamanan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Cakupan Forum/UKM dan Sekolah yang mendapat pembinaan ketahanan ekonomi sosial budaya, PKCN & Ketahanan Umat Beragama)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kelangkaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Keamanan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Kelangkaan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kutai Timur	60%	18	Laporan	Rp 150.000.000	APBD		Rp 75.000.000	
01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	a. Jumlah Konflik SARA Cakupan Penanganan Konflik Sosial di Daerah	b.			0 Kasus 100 %	3	Dokumen	Rp 6.650.000.000	APBD		Rp 3.085.000.000	
01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					Rp 6.650.000.000	APBD		Rp 3.085.000.000	
01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Cakupan Penanganan Konflik Sosial di wilayah Kutai Timur	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kutai Timur	0 Kasus 100%	4	Dokumen	Rp 150.000.000	APBD		Rp 50.000.000	
01	06	2.01	02	Penyusunan Badan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Cakupan Penanganan Konflik Sosial di wilayah Kutai Timur	Jumlah Dokumen Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kutai Timur	0 Kasus 100%	1	Dokumen	Rp 1.700.000.000	APBD Hibah PKM		Rp 50.000.000	
01	06	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Cakupan Penanganan Konflik Sosial di wilayah Kutai Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kutai Timur	0 Kasus 100%	1000	Orang	Rp 500.000.000	APBD		Rp 85.000.000	
01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Cakupan Penanganan Konflik Sosial di wilayah Kutai Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kutai Timur	0 Kasus 100%	50	Orang	Rp 600.000.000	APBD		Rp 600.000.000	
01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Cakupan Penanganan Konflik Sosial di wilayah Kutai Timur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kutai Timur	0 Kasus 100%	4	Laporan	Rp 700.000.000	APBD		Rp 600.000.000	
01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Konflik Sosial di wilayah Kutai Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kutai Timur	0 Kasus 100%	4	Dokumen	Rp 3.000.000.000	APBD		Rp 1.700.000.000	
TOTAL :												Rp 14.922.238.000			Rp 16.602.449.451	

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPALA

KESBANG DAN POLITIK

KUTAI TIMUR

Muhammad Basuni, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat IV/IVb

NIP. 19600715 198603 1 018

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024, merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Tahun 2024 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2024.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparaturnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2024 sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2024, dimana Renja Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2024, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala.

4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2024 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.

Sangatta, Januari 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kepala Badan



Muhammad Basuni, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I/IVb

NIP.19660715 198803 1 018